

ANALISIS KRITIS SISTEM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DALAM KEMASAN *SCIENTIFIC LEARNING*

Irma Zaharoh

*PPs STAIN Kediri-Jawa Timur, Indonesia, email:zidaneirma@gmail.com

Abstract:

This Articles depart from the glasses Implementation of Islamic education management that until now still experiencing significant constraints. This happens because the lack of familiarity of educational management concepts in Islamic educational institutions. The issues discussed in this journal article include: What is the Basic Concept of Management of Learning? How is the Islamic Education Institution in Indonesia? And how the System of Implementation of Islamic Education Learning Management in Indonesia (in Packaging Scientific Learning). The basic concept of learning management at least there are three basic elements that must be managed in the context of implementation of education management in Islamic educational institutions, namely: student management, management personnel, and curriculum management and teaching programs. As stated in Law No. 20 of 2003 on National Education System, Educational Institutes are grouped into three Kelomok, namely Formal Islamic Education, Non-Formal Islamic Education, and In-Formal Islamic Education. Implementation of Education System in Indonesia has been arranged clearly in the Act SISDIKNAS then translated into Government Peraturan and then operated in Meneteri Peraturan.

Keywords: *Management, Learning, Islamic Education, Scientific Learning*

PENDAHULUAN

Pada akhir-akhir ini, manajemen sebagai salah satu disiplin ilmu populer sehingga banyak kajian yang memfokuskan pembahasannya pada menejemenihan, baik yang berupa seminar, pelatihan, kuliah maupun pembukaan program studi. Program studi manajemen meliputi manajemen ekonomi, manajemen sumber daya

manusia, dan tak ketinggalan manajemen pendidikan. Dalam perkembangannya, manajemen telah diimplementasikan dalam berbagai persoalan yang bersifat bathiniyah, seperti manajemen qalbu.¹

Kesamaan manajemen baik dalam dunia bisnis, Negara, maupun pendidikan, manajemen memiliki peran penting untuk mengantarkan kemajuan organisasi. Menurut Nanang Fattah, teori manajemen mempunyai peran (*role*) atau membantu menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan (*satisfaction*).² Dengan demikian, manajemen merupakan faktor dominan dalam kemajuan organisasi. Oleh karenanya, manajemen mendapat perhatian yang semakin serius baik di kalangan pakar maupun praktisi. Hal itu meliputi fungsi-fungsi manajemen kepala sekolah, manajemen kurikulum/pembelajaran, dan interaksi warga sekolah, baik interaksi antara sekolah dan masyarakat, interaksi dalam sekolah dan kelas itu sendiri, dan yang lebih penting adalah bagaimana agar produk sekolah sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.

Implementasi manajemen pendidikan Islam, sampai saat ini masih mengalami kendala yang berarti. Hal ini terjadi disebabkan karena belum familiarnya konsep-konsep manajemen pendidikan pada institusi-institusi pendidikan Islam. Ahmad Khori sempat membuat kesimpulan dalam hasil penelitiannya dengan tema utamanya adalah manajemen strategi dalam pendidikan Islam, yaitu:

*.....From this phenomenon, I tried to offer a concept of implementation and development of Islamic education within strategic management framework related to teaching-learning process both in formal and non-formal schools. The aim is to fortify students so that they will keep holding onto Qur'an, Hadits, Ijma' and Qiyas in this global era. Core concept of the strategic management in Islamic education is indeed still novel. Therefore, it is expected that this article can be used in broader area of Islamic education.*³

Tidaklah mudah menerapkan inovasi manajemen dalam waktu yang singkat, namun fenomena yang terlihat menunjukkan bahwa keinginan untuk melakukan

¹ Menurut Made Pidarta, manajemen sekolah sangat berbeda dengan manajemen bisnis dan merupakan bagian dari manajemen Negara. Hal ini jelas berbeda karena perbedaan objek. Kalau manajemen Negara mengejar kesuksesan program pembangunan, maka manajemen sekolah mengejar kesuksesan perkembangan anak manusia melalui pelayanan-pelayanan pendidikan yang memadai. Mujami Qomar, *Manajemen pendidikan Islam, strategi baru pengelolaan pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), 3.

² Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2002), 11.

³ dalam proses pembelajaran di sekolah formal maupun non formal dengan tujuan membentengi siswa di era globalisasi agar tetap berpegang pada nilai-nilai qur'an, hadist, ijma' dan qiyas. Inti dari sebuah konsep manajemen strategik dalam pendidikan Islam memang merupakan hal yang baru sehingga harapan besar pada tulisan ini dapat digunakan di dunia pendidikan Islam yang lebih luas serta lebih mengefektifkan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Lihat, Ahmad Khori, "Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan Islam", *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Volume I, Nomor 1, Mei 2016, 75.

perubahan disektor manajemen persekolahan telah mempengaruhi system penyelenggaraan pendidikan di lingkungan institusi pendidikan Islam.

Pendidikan dalam suatu negara tentu tidak terlepas dari sejarah sosial bangsa tersebut. Seperti halnya Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim dengan keaneka ragaman ras suku dan budayanya, amat kaya akan pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan Islam, mulai dari yang bertaraf tradisional seperti Surau di Sumatra Barat, Rangkang di Aceh, Langgar di Jawa Timur, hingga yang bertaraf modern lengkap dengan manajemen dan sarana-prasarananya yang lengkap dan canggih, seperti Pondok Modern Gontor, al-Zaitun, bahkan Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), dan lain sebagainya.⁴

Berangkat dari kegalauan akademik yang telah penulis uraikan pada latar belakang di atas, sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas tentang ANALISIS KRITIS SISTEM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DALAM KEMASAN *SCIENTIFIC LEARNING*, dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel jurnal ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Konsep Dasar Manajemen Pembelajaran? Bagaimana Institusi Pendidikan Islam di Indonesia? Dan bagaimana Sistem Penyelenggaraan Manajemen Pembelajaran Pendidikan Islam Di Indonesia (dalam Kemasan *Scientific Learning*). Besar harapan; semoga dapat menjadi bahan diskusi yang menarik dan dapat dipertanggung jawabkan secara literasi ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Manajemen Pembelajaran

Secara etimologis, kata manajemen (*management*) berarti, pimpinan, direksi dan pengurus, yang diambil dari kata kerja “*manage*” dalam bahasa Perancis berarti tindakan membimbing atau memimpin. Sedangkan dalam bahasa Latin, manajemen berasal dari kata “*managiere*” terdiri dari dua kata yaitu *manus* dan *agere*. “*Manus*” berarti tangan dan “*agere*” berarti melakukan atau melaksanakan.⁵

⁴ Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Negara sudah berupaya memperbaiki sistem pendidikan Nasional termasuk di dalamnya adalah Pendidikan Islam.

⁵ Wojowarsito, Purwodarminto, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris* (Jakarta: Hasta, 1974), 6. Menurut George R Terry, manajemen ialah: suatu proses tertentu, terdiri dari *planning, organizing, actuating, controlling* dengan menggunakan dengan menggunakan seni dan ilmu pengetahuan untuk setiap fungsi itu dan merupakan petunjuk dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan terlebih dahulu. Lihat Mannulang, *Dasar-dasar Mangement* (Jakarta: Ghalia, 1976), 6. Sedangkan pembelajaran

Proses pembelajaran mengandung dua aktivitas yaitu belajar dan mengajar. Belajar sering didefinisikan sebagai perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas mengorganisasikan atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya sehingga menciptakan kesempatan bagi siswa untuk melakukan proses belajar-mengajar yang efektif. Manajemen pembelajaran pada hakekatnya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan manajemen pendidikan. Namun, ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pembelajaran merupakan bagian dari manajemen sekolah dan juga merupakan ruang lingkup bidang kajian manajemen pendidikan.⁶ Meminjam bahasa hasil penelitian Suryapermana, yang telah ter-*publish* dalam jurnal Tarbawi, ia menyatakan bahwa;

*Learning does not just exist and happens in front of our eyes and under the gaze of students who wait with anxious hopes, can-not, miss understanding, not no, not difficult to accompany the lesson. To destroy the feeling, of course, in the planning of learning teachers should pay attention to the learning system that will bandage all the actions of the process of teaching and learning activities. This is important, because if in the execution of teaching and learning process out and away from the system, then whatever is expected and pursued by teachers in learning activities will only reap failures and suffering and this is the beginning of catastrophe in the world of education.*⁷

secara etimologis berasal dari kata “*instruction*” atau disebut juga kegiatan intruksional (*instructional activities*) adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang belajar berperilaku tertentu dalam kondisi tertentu. Kata “*instruction*” mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengajaran (*teaching*). Jika kata pengajaran ada dalam konteks guru-murid di kelas formal, pembelajaran (*instruction*) mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang tidak mesti-dihadiri guru secara fisik. Oleh karena itu dalam *instruction* yang di tekankan adalah proses belajar, maka usaha-usaha terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa disebut pembelajaran. Lihat Syeb Kurdi dan Abdul Aziz, *Model pembelajaran efektif pendidikan Agama Islam di SD dan MI* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2006), 1.

⁶ Namun demikian, manajemen pendidikan mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada manajemen sekolah dan manajemen pembelajaran. Dengan perkataan lain, manajemen pembelajaran merupakan elemen dari manajemen sekolah sedangkan manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan, atau penerapan manajemen pendidikan dalam organisasi sekolah sebagai salah satu komponen dari system pendidikan yang berlaku. Manajemen pembelajaran dapat didefinisikan sebagai usaha mengelola (*me-menej*) lingkungan belajar dengan sengaja agar seseorang belajar berperilaku tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi, manajemen pembelajaran terbatas pada satu unsure manajemen sekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen system pendidikan, bahkan bisa menjangkau system yang lebih luas dan besar secara regional, nasional, bahkan internasional. Lihat E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), Cet. I, 39.

⁷ Pembelajaran tidak begitu saja ada dan terjadi di depan mata kita dan di bawah tatapan siswa yang menanti dengan harap-harap cemas, bisa tidak, mengerti tidak, faham tidak, sulit tidak mengiringi

Jadi proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru dengan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Substansi-substansi pembelajaran terdiri dari guru, murid dan kurikulum yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam proses manajemen pembelajaran, kita akan melihat bagaimana manajemen substansi-substansi proses belajar mengajar di suatu institusi pendidikan Islam itu agar berjalan dengan tertib, lancar dan benar-benar terintegrasi dalam suatu sistem kerjasama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Konsep dasar manajemen pembelajaran setidaknya ada tiga unsur pokok yang harus dikelola dalam rangka implementasi manajemen pendidikan pada institusi pendidikan Islam, yaitu: manajemen kesiswaan, manajemen tenaga kependidikan, dan manajemen kurikulum dan program pengajaran.

a. Manajemen Kesiswaan

Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk membelajarkan siswa/mahasiswa/santri telah resmi diterima di lembaga pendidikan Islam,⁸ ada beberapa langkah yang perlu ditempuh, yaitu: 1) Pengelompokan siswa/mahasiswa/santri secara homogen atau heterogen, 2) Penentuan program belajar, 3) Penentuan strategi pembelajaran, 4) Pembinaan disiplin dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, 5) Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, dan 6) Penentuan kenaikan kelas dan/nilai prestasi belajar.⁹

pelajaran tersebut. Untuk menghanguskan perasaan itu, tentunya dalam perencanaan pembelajaran guru harus memperhatikan sistem pembelajaran yang akan membalut semua tindak-tanduk proses kegiatan belajar mengajar. Ini penting, karena jika dalam pelaksanaan proses belajar mengajar keluar dan menjauh dari sistem, maka apapun yang diharapkan dan diupayakan guru dalam kegiatan pembelajaran hanya akan menuai kegagalan dan penderitaan dan ini awal malapetaka dalam dunia pendidikan. Lihat Nana Suryapermana, "MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBELAJARAN", *Jurnal TARBAWI* Vol. 3 No. 02, November 2017, 183.

⁸ Secara administratif, lembaga pendidikan Islam yang benar-benar menerapkan manajemen strategik pendidikan dengan baik sangat jarang sekali. Salah satu hal yang sangat berkaitan dengan lembaga pendidikan adalah lingkungan pendidikan yang menjadi salah satu sarana seorang anak dapat memperoleh pendidikan dengan baik. Ahmad Khorri, "Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan.", 87.

⁹ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam.*, 145.

Sehubungan dengan langkah-langkah itu, ada empat prinsip dasar dalam manajemen kesiswaan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*; Siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan sebagai objek. *Kedua*; Kenyataan bahwa kondisi siswa sangat beragam baik dari segi fisik, intelektual, sosial ekonomi, minat dan sebagainya. *Ketiga*; Siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyukai apa yang diajarkan. *Keempat*; Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, siswa seharusnya diberikan peran yang lebih aktif lagi dalam berbagai kegiatan sekolah. Mereka hendaknya dilibatkan penuh dalam proses pembelajaran, bukan saja sebagai peserta, tetapi juga penggagas pelaksanaan kegiatan, sehingga guru dan siswa sama-sama menjadi subjek. Artinya, siswa diharapkan berperan aktif, berinisiatif dan berkreasi dalam proses pembelajaran di sekolah.

b. Manajemen Tenaga Kependidikan

Guru¹⁰ adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.¹¹ Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Disamping itu, peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber seperti radio, televisi, film pembelajaran, bahkan program internet atau *electronic learning (e-learning)*. Derasnya arus informasi serta cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memunculkan pertanyaan terhadap tugas utama guru yang

¹⁰ Kirby dalam Suryapermana mengatakan bahwa semua yang ada dan tercipta dalam proses pembelajaran, tertambat di pundak guru: “*One underlying the teacher is the essential, constant feature in the success of any educational system*”. Lihat Nana Suryapermana, “MANAJEMEN PERENCANAAN”, 187.

¹¹ Sejak adanya kehidupan ini, sejak itu pula guru telah melaksanakan pembelajaran, dan memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang pertama dan utama. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum di ketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang di pelajari. E. Mulyasa, *Menjadi Guru Professional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), cet VI, 38.

disebut “mengajar” masih perlukah guru mengajar di kelas seorang diri, menginformasikan, menjelaskan, dan menerangkan?

Kegiatan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam komunikasi. Jika faktor-faktor di atas dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan itu, sebagai orang yang bertugas menjelaskan sesuatu, guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik, dan berusaha lebih terampil dalam memecahkan masalah. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran, sebagai berikut:

- a) Membuat ilustrasi: pada dasarnya ilustrasi menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari peserta didik dengan sesuatu yang telah diketahuinya, dan pada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada mereka.
- b) Mendefinisikan: meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta pengertian yang dimiliki oleh peserta didik.
- c) Menganalisis: membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian
- d) Mensintesis: mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti, hubungan anatara bagian yang satu dengan yang lain nampak jelas dan setiap masalah itu tetap berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar.
- e) Bertanya: mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar apa yang dipelajari menjadi lebih jelas, seperti yang dilakukan Socrates.
- f) Merespon: mereaksi atau menanggapi pertanyaan peserta didik. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru dapat merespon setiap pertanyaan peserta didik.
- g) Mendengarkan: memahami peserta didik dan berusaha menyederhanakan setiap masalah, serta membuat kesulitan nampak jelas baik guru maupun peserta didik.

- h) Menciptakan kepercayaan: peserta didik akan memberikan kepercayaan terhadap keberhasilan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar.
 - i) Memberikan pandangan yang bervariasi: melihat bahan yang dipelajari dari berbagai sudut pandang dan melihat masalah dalam kombinasi yang bervariasi.
 - j) Menyediakan media untuk mengkaji materi standar: memberikan pengalaman yang bervariasi melalui media pembelajaran dan sumber belajar yang berhubungan dengan materi standar.
 - k) Menyesuaikan metode pembelajaran: menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik serta menghubungkan materi baru dengan sesuatu yang telah dipelajari.
 - l) Memberikan nada perasaan: membuat pembelajaran lebih bermakna dan hidup melalui antusias dan semangat.¹²
- c. Manajemen Kurikulum

Dalam proses pembelajaran, komponen manajemen kurikulum sebagai program studi diartikan sebagai upaya pengelolaan seperangkat mata pelajaran yang harus dikuasai oleh guru dan mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di instansi pendidikan lainnya. Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam proses pembelajaran adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka hal ini berarti kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya dengan baik. Bagian-bagian ini disebut komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan.¹³

Menurut Ramayulis, komponen kurikulum itu meliputi:

- a) Tujuan yang ingin dicapai meliputi: (1) tujuan akhir (2) tujuan umum (3) tujuan khusus (4) tujuan sementara.

¹² Ibid., 39-40.

¹³ H. Ramayulis, *ILmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), cet VI, 152.

- b) Isi kurikulum. Berupa materi yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi tersebut disusun ke dalam silabus, dan dalam mengaplikasikannya dicantumkan pula dalam satuan pembelajaran dan rencana pembelajaran.
- c) Media (sarana dan prasarana) pembelajaran
- d) Media sebagai sarana perantara dalam pembelajaran untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik.
- e) Strategi. Merujuk pada pendekatan dan metode serta teknik mengajar yang digunakan. Dalam strategi termasuk juga komponen penunjang lainnya seperti (1) sistem administrasi (2) pelayanan BK (3) remedial (4) pengayaan dsb.
- f) Proses pembelajaran. Komponen ini sangat penting, sebab diharapkan melalui proses pembelajaran akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran dituntut sarana pembelajaran yang kondusif, sehingga memungkinkan dan mendorong kreatifitas peserta didik dengan bantuan pendidik.
- g) Evaluasi. Dengan evaluasi (penilaian) dapat diketahui cara pencapaian tujuan.¹⁴

B. Perencanaan dan Pengelolaan Pembelajaran

Secara terminologis, perencanaan pembelajaran terdiri atas dua kata, yaitu kata perencanaan dan pembelajaran. Untuk memahami konsep dasar perencanaan pembelajaran, marilah kita perhatikan pengertian di bawah ini.

Pertama, perencanaan yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, proses suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Elly

¹⁴ Ibid., 154-155

(1979), perencanaan itu pada dasarnya adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan.¹⁵

Kedua, pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang bersumber dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu.¹⁶ Adapun langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran, yaitu sebagai berikut:

- a) Merumuskan tujuan khusus. Rumusan tujuan pembelajaran harus mencakup tiga aspek penting yang diistilahkan oleh Bloom (1956) merupakan domain kognitif, afektif dan domain psikomotorik.
- b) Pengalaman belajar. Langkah kedua dalam merencanakan pembelajaran adalah memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman.

¹⁵ Dari pendapat di atas, maka setiap perencanaan minimal harus memiliki empat unsure sebagai berikut: 1) Adanya tujuan yang harus di capai. 2) Adanya strategi untuk mencapai tujuan. 3) Sumber daya yang dapat mendukung. 4) Implementasi setiap keputusan. Lihat Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desai System Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet 1, 23-24. Agar perencanaan yang di susun itu dapat berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran, maka dalam penyusunan perencanaan harus memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) *Signifikansi*. Signifikansi (kebermaknaan/manfaat) artinya, perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna/bermanfaat agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. 2) *Relevan* (sesuai) nilai relevansi dalam perencanaan adalah bahwa perencanaan yang kita susun memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal. Kesesuaian itu harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 3) *Kepastian*. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, mungkin guru merasa banyak alternatif yang di gunakan. Namun, hendaknya guru menentukan alternative mana yang sesuai dan dapat di implementasikan. 4) *Adaptabilitas*. Perencanaan pembelajaran yang di susun hendaknya bersifat lentur dan tidak kaku. 5) *Kesederhanaan*. Perencanaan pembelajaran yang di susun harus bersifat sederhana artinya mudah di terjemahkan dan mudah di implementasikan. 6) *Prediktif*. Perencanaan pembelajaran yang baik harus memiliki daya ramal yang kuat, artinya perencanaan dapat menggambarkan “apa yang terjadi, seandainya.....” daya ramal ini penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, dengan demikian akan mudah untuk mengantisipasinya.

¹⁶ *Ibid.*, 26. Selanjutnya adalah pengelolaan pembelajaran. Seperti telah di kemukakan sebelumnya bahwa pengelolaan pembelajaran dimulai dari perencanaan pembelajaran itu sendiri. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran adalah menyusun perencanaan pembelajaran. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang melibatkan tenaga kependidikan/guru dengan siswa.

- c) Kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai, pada dasarnya kita dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individu.
- d) Orang-orang yang terlibat. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Dalam pelaksanaan peran tersebut diantaranya guru berfungsi sebagai penyampai informasi. Agar guru dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka guru harus memiliki kemampuan untuk berbicara serta berkomunikasi, menggunakan berbagai media seperti, OHP, LCD, papan tulis dan lain sebagainya.
- e) Bahan dan alat. Pemilihan bahan dan alat juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran.
- f) Fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran.
- g) Perencanaan evaluasi dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam sebuah sistem perencanaan pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran.¹⁷

C. Institusi Pendidikan Islam di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang majemuk, kaya dengan keaneka ragam suku, budaya, bahasa, dan adat istiadatnya memiliki berbagai bentuk Institusi Pendidikan. Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Institusi Pendidikan dikelompokkan menjadi tiga Kelompok, yaitu Pendidikan Islam Formal, Pendidikan Islam Non-Formal, dan Pendidikan Islam In-Formal.

a. Pendidika Formal

Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan dengan jelas bahwa “Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan

¹⁷ Lihat Nana Suryapermana, “MANAJEMEN PERENCANAAN., 184.

menengah, dan pendidikan tinggi.¹⁸ Abu Ahmad dan Nur Uhbiyato memberi pengertian tentang lembaga pendidikan sekolah, yaitu bila dalam pendidikan tersebut diadakan ditempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi.¹⁹

Haidar Nawawi mengelompokkan lembaga pendidikan sekolah kepada lembaga pendidikan yang kegiatan pendidikannya diselenggarakan secara sengaja, berencana, sistematis dalam rangka membantu anak dalam mengembangkan potensinya agar mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi.²⁰

Di Indonesia yang termasuk kategori lembaga pendidikan formal adalah sebagai berikut: a) Raudhatul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal, atau nama lain sesuai dengan pendiriannya, b) Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Islam (SDI), c) Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI), atau nama lain yang setingkat dengan lembaga ini, d) Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) atau nama lain yang setingkat dengan lembaga ini, dan e) Perguruan Tinggi Islam antara lain adalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Universitas Islam Negeri (UIN) atau lembaga sejenis milik Yayasan atau organisasi keIslaman

b. Pendidikan Non Formal

Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.²¹ Ramayulis mengartikan pendidikan Non-Formal adalah lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.²² Dengan kata lain dapat dipahami bahwa pendidikan Islam non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan tanpa mengikuti peraturan yang baku dari pemerintah.

¹⁸ Undang-Undang NO 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 11

¹⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), cet VI, 282.

²⁰ Ibid., 282.

²¹ Undang-Undang NO 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat Pasal 12.

²² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, 283.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP No. 55 tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan formal, nonformal, dan informal. Di dalam PP No. 55 tahun 2007 menyebut majelis taklim, pengajian kitab, pendidikan al-Qur'an dan diniyah taklimiyah sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam.

Beberapa diantara pendidikan Islam yang tidak formal diselenggarakan oleh masyarakat dan masih tetap eksis hingga sekarang adalah sebagai berikut: a) Masjid, Mushalla, Langgar, Surau dan Rangkang, b) Madrasah Diniyah, c) Majlis Ta'lim, TPQ, Taman Pendidikan Seni al-Qur'an, Jama'ah wirid, d) Kursus-kursus KeIslaman, e) Badan-badan Pembinaan Rohani, dan f) Badan-Badan Konsultasi keagamaan

c. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.²³ Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya.²⁴ Pengertian ini berarti menegaskan bahwa yang masuk dalam kategori pendidikan Islam informal adalah pendidikan Islam yang diberikan oleh orang tua kepada keluarganya dan juga pendidikan Islam di lingkungan masyarakat seperti majelis ta'lim yang ada di masjid-masjid atau mushola.

Praktek pendidikan Islam informal tidak terikat dengan penjenjangan, waktu, atau muatan kurikulumnya. Pendidikan berjalan secara alami dan materi pendidikannya bersifat kondisional dan sesuai dengan kebutuhan tanpa ada program waktu dan evaluasi.

D. Desain System, Metode dan Media Pembelajaran dalam Kemasan *Scientific Learning*

Meminjam bahasa yang digunakan oleh Ghozali yang dikutip dari Ine, ia mencoba untuk memberikan sebuah *ground mapping* terkait masalah *scientific learning*, bahwa:

²³ Undang-Undang NO 20 tahun 2003 ... Pasal 13.

²⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikanm Islam.*, 281.

Pendekatan *scientific* menjadikan pembelajaran lebih aktif dan tidak membosankan, siswa dapat mengonstruksi pengetahuan dan keterampilannya melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan di lapangan guna pembelajaran. Selain itu, dengan pembelajaran berbasis pendekatan *scientific* ini, siswa didorong lebih mampu dalam mengobservasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan hal-hal yang dipelajari dari fenomena alam ataupun pengalaman langsung.²⁵

Artinya bahwa; Pendekatan *scientific* memiliki karakteristik “*doing science*”. Metode ini memudahkan guru atau pengembang kurikulum untuk memperbaiki proses pembelajaran, yaitu dengan membagi proses kedalam langkah-langkah atau tahapan-tahapan secara terperinci yang memuat instruksi untuk siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pendekatan *scientific* atau lebih umum dikatakan pendekatan ilmiah merupakan pendekatan kurikulum 2013.²⁶

Selanjutnya, kembali pada seputar definisi pada sub-bab di atas. Menurut Herbert Simon, desain sebagai proses pemecahan masalah. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencari solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dalam konteks pembelajaran, desain intruksional dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran beserta aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber-sumber pembelajaran yang dapat digunakan serta perencanaan evaluasi keberhasilan. Desain intruksional yang baik harus memiliki beberapa kriteria diantaranya: a) Berorientasi pada siswa. Beberapa hal yang perlu dipahami tentang siswa diantaranya: kemampuan dasar dan gaya belajar, b) Berpijak pada pendekatan sistem c) Teruji secara empiris.

Perencanaan pembelajaran berbeda dengan desain pembelajaran (*intructional design*), namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat sebagai program pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun untuk

²⁵ Imam Ghozali1, “PENDEKATAN SCIENTIFIC LEARNING DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA”, *Jurnal Pedagogik*, Vol. 04 No. 01, Januari-Juni 2017, 4-5.

²⁶ *Ibid.*, 5.

kebutuhan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Dengan demikian, perencanaan merupakan kegiatan menerjemahkan kurikulum sekolah kedalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Perencanaan program pembelajaran dapat berupa perencanaan untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan menggunakan, bahkan rancangan untuk kegiatan tahunan sesuai dengan tujuan kurikulum yang hendak dicapai. Dengan demikian isinya bisa terdiri dari tujuan khusus yang spesifik, prosedur kegiatan belajar mengajar, materi pelajaran, waktu yang diperlukan sampai bentuk evaluasi yang digunakan.

Sekarang berlanjut dengan pengembangan media pembelajaran. Pentingnya mengembangkan media pembelajaran dikarenakan teknologi informasi terus berkembang sampai saat ini. Perkembangan teknologi memunculkan istilah ICT (*Information Communication Technology*) yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru dan siswa melalui bahasa verbal sebagai media utama penyampaian materi pelajaran. Menurut Rossi dan Breidle (1966), media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya.²⁷

Adapun jenis media pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi (yang kemudian dalam makalah ini disebut dengan *scientific learning*), seperti di bawah ini:

- a) Media berbasis visual. Visualisasi pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti foto, gambar/ilustrasi, sketsa, grafik, bagan, *chart*, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih.
- b) Media berbasis audio-visual. Media audio-visual merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Peralatan audio-visual seperti tape-recorder, OHP, LCD, slide, dsb.
- c) Media berbasis komputer. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran dikenal dengan nama *Computer Assited Instruction* (CAI) atau *Computer*

²⁷ Ibid., 204.

Assited Learning (CAL). Komputer digunakan untuk tujuan menyajikan isi pembelajaran. CAI bisa berbentuk tutorial, *drills and practice*, simulasi dan permainan.

- d) Multimedia berbasis komputer dan *inter-active* video. Pembelajaran dengan menggunakan lebih dari satu media, bisa berupa kombinasi antara teks grafik, animasi suara, dan video.²⁸

E. Pengembangan Evaluasi Pembelajaran dalam Kemasan *Scientific Learning*

Pentingnya pengembangan evaluasi pembelajaran adalah untuk menjelaskan keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan tes, menjelaskan pengertian dan kriteria tes hasil belajar, menjelaskan kriteria tes dengan evaluasi, mendeskripsikan fungsi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, dan memberikan kritik terhadap ujian nasional sebagai salah satu bentuk evaluasi hasil belajar di Indonesia. Adapun alat evaluasi pembelajaran diantaranya sebagai berikut:

- a) Tes hasil belajar. Untuk mengukur keberhasilan belajar siswa atau dikenal dengan istilah penilaian acuan patokan (PAP). PAP bisa digunakan bila guru menggunakan tes seperti: tes prasyarat (*entry-behavior test*), tes awal (*pre test*), tes akhir (*post test*), dan tes pengukur kemajuan (*progress test*).
- b) Kriteria tes. Sebagai alat ukur dalam evaluasi, tes harus memiliki dua kriteria, yaitu validitas dan realibilitas.
- c) Jenis-jenis tes. Tes berdasarkan jumlah siswa, ada tes kelompok atau tes individual. Sedangkan dari cara pelaksanaan, tes dapat dibedakan menjadi tes lisan, tes tulisan dan tes perbuatan.²⁹

Kemudian beralih pada evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah proses memberikan pertimbangan nilai dari arti sesuatu yang dipertimbangkan. Ada dua hal yang menjadi karakteristik evaluasi. Pertama, evaluasi merupakan suatu

²⁸ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran* (Jakarta: Raja Garfindo persada, 2006), 105.

²⁹ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain.*, 232-234.

proses. Kedua, evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Adapun fungsi evaluasi adalah sebagai berikut:

- a) Evaluasi merupakan alat penting sebagai umpan balik siswa
- b) Evaluasi merupakan alat penting untuk bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah di tentukan.
- c) Evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan kurikulum.
- d) Evaluasi berguna untuk pengembang kurikulum.
- e) Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah.

F. Analisis Kritis Sistem Penyelenggaraan Manajemen Pembelajaran Pendidikan Islam di Indonesia dalam Kemasan *Scientific Learning*

Sistem adalah suatu gagasan atau prinsip yang bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan.³⁰ Dengan demikian sistem pendidikan bisa difahami sebagai himpunan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan.³¹ Dalam mengkaji sistem pendidikan dalam suatu negara tidak terlepas dari falasafah suatu bangsa tersebut. Ketika negara-negara barat mempunyai falsafah hidup rasionalis, materialis, dan pragmatis maka sistem pendidikan yang dibuat oleh barat tentu bercorak rasionalis, pragmatis, dan materialis. Falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian maka sistem pendidikan Nasional Indonesia (Pendidikan Islam) bercorak khusus Indonesia yang tidak ditemui pada sistem pendidikan lainnya. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³²

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Indonesia sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang SISDIKNAS kemudian dijabarkan ke dalam

³⁰ DG Ryan, *System Analisis in Educational Planning* dalam Ramayulis, *Ilmu Pendidikanm Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), cet VI, 3.

³¹ Imam Barnadib, *Filsafa6 Pendidikan Tinjauan Beberapa Aspek dan Proses Pendidikan* (Yogyakarta: Studying, 1982), 19.

³² Ramayulis, *Ilmu Pendidikanm Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), cet VI, 37.

Peraturan Pemerintah lalu dioperasikan dalam Peraturan Menteri. Pendidikan Islam merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Islam sehingga sistemnya mengikuti Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan keagamaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Bab I, Pasal 1, Ayat 2 berbunyi, “pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya”.

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam In-Formal dan Non-formal memang disebut dalam Peraturan Pemerintah akan tetapi dalam pelaksanaannya berjalan secara alami tanpa terikat dengan peraturan yang baku dan diselenggarakan sesuai dengan situasi, kondisi dan tujuan penyelenggaraannya.³³

a. Tujuan Pendidikan Islam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Tujuan Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional maka tujuan pendidikannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila

³³ Adapun sistem penyelenggaran pendidikan Islam formal di Indonesia sebagai bagian dari pendidikan nasional tentu tidak terlepas dari Sistem Pendidikan Nasional. Penyelenggaraan Pendidikan Islam mengacu pada delapan Standar pendidikan nasional yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32. tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, pemerintah telah menetapkan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Berikut ini adalah Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan pemerintah melalui Permendikbud No 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

SD/MI/SDLB/PAKET A	
Dimensi	Kualifikasi kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya.
SMP/MTS/SMPLB/PAKET B	
Dimensi	Kualifikasi kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.

Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis.
SMA/MA/SMALB/PAKET C	
Dimensi	Kualifikasi kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

b. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.³⁴

Kurikulum yang diberlakukan untuk tingkat MI - MA mulai tahun ajaran 2013/2014 adalah kurikulum 2013 yang mana kurikulum tersebut telah memenuhi kedua dimensi tersebut. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: a) mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik; b) sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat

³⁴ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 1

dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; c) mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; d) memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan; e) kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran; f) kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti; dan g) kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).³⁵

c. Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan Islam diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Untuk itu setiap satuan pendidikan Islam harus melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi maka prinsip pembelajaran yang digunakan: 1) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; 2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; 3) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; 4)

³⁵ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 3

dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; 5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; 6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; 8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*); 9) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; 10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*); 11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; 12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas; 13) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan 14) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.³⁶

Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific*), tematik terpadu (tematik antar mata pelajaran), dan tematik

³⁶ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah. 1-2.

(dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).³⁷

d. Pembiayaan, dan Penilaian

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Indonesia telah menetapkan anggaran 20 % dari APBN untuk pendidikan. Sehingga ada bantuan bagi sekolah berupa BOS, BSM, Blok Grand, DAK dan lain-lain. Pendanaan Pendidikan Islam formal menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. UU Sisdikna Mengamanatkan “a) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, b) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”³⁸

Evaluasi merupakan bagian yang cukup penting dalam pendidikan Islam. Baik mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Untuk penilaian lembaga pendidikan formal tidak MI/MTs/MA/yang sederajat telah diatur dalam Permendikbud No. 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah.³⁹

³⁷ Ibid., 3.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46.

³⁹ Penilaian-penilaian tersebut adalah:

a. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran.

Ruang lingkup Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.⁴⁰

Mekanisme penilaian mulai jenjang Sekolah Dasar sampai Menengah diatur sebagai berikut: a) Penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan, b) Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian, c) Penilaian projek dilakukan oleh pendidik untuk tiap

-
- b. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
 - c. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
 - d. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
 - e. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
 - f. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
 - g. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
 - h. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
 - i. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan MTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
 - j. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.
 - k. Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan. (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan)

⁴⁰ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

akhir bab atau tema pelajaran, d) Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan, e) Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, dilakukan oleh pendidik dibawah koordinasi satuan pendidikan, f) Ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir kelas II (tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), kelas VIII (tingkat 4), dan kelas XI (tingkat 5), dengan menggunakan kisi-kisi yang disusun oleh Pemerintah. Ujian tingkat kompetensi pada akhir kelas VI (tingkat 3), kelas IX (tingkat 4A), dan kelas XII (tingkat 6) dilakukan melalui UN, g) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi dilakukan dengan metode survei oleh Pemerintah pada akhir kelas II (tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), kelas VIII (tingkat 4), dan kelas XI (tingkat 5), h) Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, i) Ujian Nasional dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹

PENUTUP

Sebagai bentuk jawaban dari kejanggalan akademik berupa rumusan masalah pada bagian pendahuluan, akhirnya artikel ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep dasar manajemen pembelajaran setidaknya ada tiga unsur pokok yang harus dikelola dalam rangka implementasi manajemen pendidikan pada institusi pendidikan Islam, yaitu: manajemen kesiswaan, manajemen tenaga kependidikan, dan manajemen kurikulum dan program pengajaran.
2. Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Instutusi Pendidikan dikelompokkan menjadi tiga Kelomok, yaitu Pendidikan Islam Formal, Pendidikan Islam Non-Formal, dan Pendidikan Islam In-Formal.
3. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Indonesia sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang SISDIKNAS kemudian dijabarkan ke dalam

⁴¹ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Pemerintah lalu dioprasionalkan dalam Peraturan Menteri. Pendidikan Islam merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Islam sehingga sistemnya mengikuti Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan keagamaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Bab I, Pasal 1, Ayat 2 berbunyi, “pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan / atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya”. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam In-Formal dan Non-formal memang disebut dalam Peraturan Pemerintah akan tetapi dalam pelaksanaannya berjalan secara alami tanpa terikat dengan peraturan yang baku dan diselenggarakan sesuai dengan situasi, kondisi dan tujuan penyelenggaraannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad, Azhar. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006.
- Barnadib, Imam. *Filsafat Pendidikan Tinjauan Beberapa Aspek dan Proses Pendidikan*. Yogyakarta: Studying, 1982.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Ghozali1, Imam. “PENDEKATAN SCIENTIFIC LEARNING DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA”, *Jurnal Pedagogik*, Vol. 04 No. 01, Januari-Juni 2017.
- Khori, Ahmad. “Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan Islam”, *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Volume I, Nomor 1, Mei 2016.
- Kurdi, Syeb dan Abdul Aziz. *Model pembelajaran efektif pendidikan Agama Islam di SD dan MI*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2006.
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 1

- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 3
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah. 1-2.
- Mannulang. *Dasar-dasar Mangement*. Jakarta: Ghalia, 1976.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002, Cet. I.
- Qomar, Mujami. *Manajemen Pendidikan Islam, Strategi Baru Pengelolaan Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ramayulis. *ILmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008, cet VI.
- Ryan, DG. *System Analisis in Educational Planning* dalam Ramayulis, *Ilmu Pendidikanm Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2006, cet VI.
- Suryapermana, Nana. "MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBELAJARAN", *Jurnal TARBAWI*. Vol. 3 No. 02, November 2017.
- Undang-Undang NO 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 11
- Undang-Undang NO 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat Pasal 12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46.
- Wojowarsito, Purwodarminto. *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*. Jakarta: Hasta, 1974.